

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari pajak. Peranan pajak sangat dominan terhadap pendapatan Negara. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus-menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Pulungan, 2015).

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah

mengharapkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di pihak lain, wajib pajak memandang bahwa pembayaran pajak merubah suatu beban yang nantinya dapat mengurangi pendapatannya. Wajib pajak berusaha akan meminimalkan membayar pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah laba yang diterima.

Ada beberapa cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu: *Tax planning* (perencanaan pajak), *Tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). *Tax avoidance* adalah suatu usaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan suatu negara yang ada. *Tax avoidance* bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya upaya ini bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan. *Tax evasion* adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Sulitnya penerapan *tax planning* dan *tax avoidance* membuat seseorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion* (Silaen, 2015).

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016).

Penggelapan pajak sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang sempat ramai dalam berita adalah kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan). Gayus terlibat tiga pasal berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Direktur Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menjelaskan tindakan Gayus yang menerima uang suap dari pengusaha atau wajib pajak nakal memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak (Rini, 2013) dalam (Ningsih dan Pusposari, 2014)

Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (tax evasion) sebagian besar baru mendiskusikan aspek-aspek teknis dari penggelapan

pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Seringkali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006) dalam (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011) setiap masyarakat mempunyai kewajiban kepada negaranya untuk membayar pajak, dan negara mempunyai tanggungjawab mensejahterakan rakyatnya secara adil. Kondisi pelaksanaan perpajakan yang dinilai tidak adil antara lain tampak dari tidak ditegakkannya aturan hukum pajak secara baik, wajib pajak tidak mampu secara ekonomi dan dana pajak digunakan untuk hal yang tidak adil (misalnya perang). Dalam situasi keadilan yang dijunjung tersebut, wajib pajak dapat menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak akan menganggap perilaku tidak patuh pajak sebagai hal yang wajar. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin tinggi keadilan perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis namun apabila keadilan perpajakannya semakin rendah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis.

Sistem merupakan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri (Jogiyanto, 2005) dalam (Ningsih dan Pusposari, 2014).

Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adanya peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani, Nurlaela dan Wahyuningsih, 2016).

Kualitas pelayanan menurut Fitria (2010) dalam Yetmi, Darmayanti dan Muslim (2014) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya. Pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak

mungkin berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena wajib pajak senantiasa akan memenuhi kewajibannya jika pelayanannya baik, maka wajib pajak merasa senang dan dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya.

Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan Pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Pulungan, 2015).

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014) yang menggunakan tiga variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan dua variabel independen yaitu kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Peneliti mengambil objek

pajak penelitian dengan sudut pandang mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, dimana mahasiswa ini telah memperoleh mata kuliah tentang perpajakan dan nantinya merupakan generasi yang akan meneruskan kepemimpinan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) Studi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

5. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Mengetahui apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Mengetahui apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
5. Mengetahui apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem keadilan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan



kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak.

## 2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak.

## E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab Pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab Metode Penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, serta pembahasan atau hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Bab Penutup berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.